

**ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN PENGELUARAN  
PEMERINTAH DAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP  
KETIMPANAN WILAYAH  
(STUDI KASUS 35 KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN  
2016-2020)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh:**

**SENLY APRILINA**

**B300170280**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN PENGELUARAN  
PEMERINTAH DAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP  
KETIMPANAN WILAYAH  
(STUDI KASUS 35 KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN  
2016-2020)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**SENLY APRILINA**

**B300170280**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



**Muhammad Arif, SE. ME.c. Dev**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN PENGELUARAN  
PEMERINTAH DAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP  
KETIMPANAN WILAYAH  
(STUDI KASUS 35 KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN  
2016-2020)**

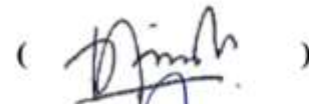
**OLEH  
SENLV APRILINA  
B300170280**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Sabtu, 30 Oktober 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

- 1. Muhammad Arif, S.E., M.Ec. Dev  
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Siti Fatimah Nurhayati, S.E, M.Si  
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Siti Aisyah, S.E, M.Si  
(Anggota II Dewan Penguji)**

(  )

(  )

(  )

**Dekan**



**Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si  
NIDN. 0616087401**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Oktober 2021

Penulis



**SENLY APRILINA**

**B300170280**

**ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN PENGELUARAN  
PEMERINTAH DAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP  
KETIMPANAN WILAYAH  
(STUDI KASUS 35 KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN  
2016-2020)**

**Abstrak**

Ketimpangan pembangunan wilayah merupakan perbedaan pembangunan antara wilayah satu dengan wilayah lain secara horizontal maupun vertikal. Sehingga pada setiap negara terdapat daerah maju dan daerah terbelakang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020. Ketimpangan pembangunan wilayah sebagai variabel dependen diukur dengan metode Indeks Williamson. Berdasarkan tujuan tersebut, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model (FEM)*. Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel dan uji hipotesis, ditemukan bahwa secara simultan (Uji F) dana perimbangan, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Berdasarkan Uji t pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan dengan arah positif.

**Kata kunci:** ketimpangan pembangunan wilayah, dana perimbangan, pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi

**Abstract**

Regional development inequality is the difference in development between one region and another horizontally and vertically. So that in every country there are developed areas and underdeveloped areas. This study aims to determine the effect of balancing funds, government expenditures and economic growth on regional development inequality in 35 regencies/cities in Central Java Province in 2016-2020. Regional development inequality as the dependent variable is measured by the Williamson Index method. Based on these objectives, the data analysis method used is the panel data analysis method with the Fixed Effect Model (FEM) approach. Based on the estimation results of panel data regression and hypothesis testing, it was found that simultaneously (Test F) balancing funds, government expenditures and economic growth simultaneously affected the development inequality between regions in Central Java Regency/City. Based on the t test, economic growth has a significant positive effect in a positive direction.

**Keywords:** regional development, inequality, balancing funds, government expenditures, economic growth

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses dimana pendapatan riil per kapita suatu negara mengalami kenaikan dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan. Oleh karenanya, pembangunan ekonomi tidak hanya berpusat pada *Gross National Product* (GNP) saja namun juga memerlukan perbaikan dari segi sosial, sistem kelembagaan dan perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat (Meirer, 1995) yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses dimana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang.

Todaro and Smith (2003) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, (2) meningkatkan rasa harga diri masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih. Dari ketiga nilai pokok tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembangunan harus memiliki ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam kebutuhan hidup dan peningkatkan standar hidup mulai dari penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan pendidikan hingga mengurangi ketergantungan terhadap negara lain.

Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, negara-negara di dunia khususnya negara berkembang tidak lepas dari berbagai permasalahan, diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, hingga ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin melebar. Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan kini merupakan masalah pokok dalam pembangunan dan sasaran utama kebijakan pengangguran di banyak negara (Todaro, 2000).

Pembangunan ekonomi seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, apabila terdapat masyarakat yang masih belum merasakan hasil dari pembangunan, maka terdapat ketimpangan pembangunan antar wilayah yang tengah terjadi. Samirin (2014) menyebutkan bahwa semakin melebarnya ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin, masih lebarnya perbedaan

kesejahteraan antara wilayah barat dan timur Indonesia, masih terpuruknya masyarakat di daerah perbatasan dan banyaknya masyarakat miskin yang belum terpenuhi syarat minimal mereka untuk memanusiaikan dirinya adalah bukti bahwa ada sesuatu yang salah dalam pembangunan di Indonesia.

Ketimpangan pembangunan wilayah merupakan permasalahan yang umum terjadi di banyak negara. Mulai dari negara miskin, berkembang hingga maju tidak lepas dari permasalahan ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan wilayah terjadi karena perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi masing-masing wilayah. Karena perbedaan tersebut tiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan sehingga dapat dilihat bahwa setiap daerah terdapat wilayah maju dan terbelakang.

Ketimpangan pembangunan wilayah justru lebih rentan terjadi di negara berkembang. Hal ini lantaran pada saat proses pembangunan terjadi, daerah dengan kondisi pembangunan yang telah baik lebih mendapatkan perhatian dan peluang untuk meningkatkan pembangunannya. Berbeda dengan wilayah di kondisi yang terbelakang cenderung tidak dapat memaksimalkan pembangunan karena sarana dan prasarana yang terbatas ditambah dengan kondisi sumber daya manusia yang rendah.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di pulau jawa dengan total 35 kabupaten/kota. Sebagai salah satu provinsi padat penduduk di Indonesia, Jawa Tengah tidak lepas dari masalah ketimpangan pembangunan. Hal ini dikarenakan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi tiap daerah yang diakibatkan oleh migrasi penduduk produktif yang memiliki skill ke daerah-daerah yang telah berkembang, investasi yang lebih besar di daerah berkembang, hingga kebijakan pemerintah yang mengakibatkan terkonsentrasinya sosial dan ekonomi yang terpusat di daerah berkembang (BPS, 2017).

Pertumbuhan ekonomi sendiri dianggap sebagai salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan pembangunan, namun dalam kasus Jawa Tengah pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antar kabupaten/kota mengakibatkan dampak negatif bagi daerah-daerah dengan pembangunan yang masih rendah,

sehingga berakibat pada tingginya ketimpangan pembangunan antar wilayah dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Salah satu cara untuk mengukur tingkat ketimpangan yang terjadi di Jawa Tengah adalah dengan menggunakan index williamson dengan hasil apabila nilai index williamson mendekati angka 1, maka ketimpangan di daerah tersebut termasuk tinggi dan apabila nilai index williamson mendekati angka 0 maka ketimpangan daerah tersebut termasuk rendah.

Angka ketimpangan pembangunan yang ditunjukkan oleh nilai index williamson di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 sebesar 0,65 yang mana ketimpangan pembangunan di tahun tersebut termasuk tinggi. Perbaikan pemerataan pembangunan terlihat pada tahun 2017 dimana nilai ketimpangan Jawa Tengah turun menjadi 0,64 dan terus menunjukkan trend yang baik di tahun 2018 dengan nilai ketimpangan sebesar 0,63 dan angka tersebut bertahan hingga tahun 2019. Pada tahun 2020 dapat dilihat bahwa Jawa Tengah telah menunjukkan keberhasilan perbaikan pemerataan pembangunan dengan nilai ketimpangan sebesar 0,61. Meskipun Provinsi Jawa Tengah mengalami perbaikan dalam pemerataan pembangunan, namun ketimpangan pembangunan masih berkisar di angka 0,6 dimana angka tersebut mendekati angka 1 yang berarti ketimpangan di Jawa Tengah masih tergolong tinggi.

Ketimpangan pembangunan harus diatasi dengan tepat sasaran agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih serius seperti masalah kependudukan, ekonomi, sosial hingga politik. Oleh karenanya, peran pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk membantu mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi di wilayah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ketimpangan pembangunan wilayah merupakan isu penting dalam upaya pemerataan pembangunan suatu wilayah, maka topik penelitian yang diambil penulis yaitu, Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Wilayah (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016-2020).



## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan penekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk data panel dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan adalah 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan data (1) PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan; (2) Jumlah Penduduk; (3) Dana Peimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil; (4) Realisasi Pengeluaran Pemerintah dan; (5) Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan (DJPK). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil Estimasi

Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel

Variabel	CEM		FEM		REM	
	Koefisien	Prob	Koefisien	Prob	Koefisien	Prob
C	-10.96917	0.000	-0.758774	0.719	-4.715390	0.0050
DP	-0.762523	0.088	0.080291	0.519	0.216139	0.0550
GE	1.133328	0.011	-0.040134	0.655	-0.040677	0.6465
GROWTH	-0.002325	0.225	0.000392	0.073	0.000234	0.2604
R-Squared	0.564		0.996		0.209	
Adj.R2	0.527		0.995		0.143	
F-Statistik	15.536		806.266		3.184	
Prob-F	0.000		0.000		0.035	

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob
Cross Section F	499.612366	(7,29)	0,0000

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa nilai Prob.F statistik adalah  $0,000 < \alpha (0,05)$ , maka  $H_0$  tidak ditolak. Sehingga model terpilih adalah FEM

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi.Sq. d.f	Prob
Cross Section Random	26.642789	3	0,0000

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa nilai Cross Section Chi.Square adalah  $0,000 < \alpha (0,05)$ , maka  $H_0$  tidak ditolak. Kesimpulannya yaitu model terpilih adalah FEM.

Tabel 4. Hasil Estimasi FEM

<b><math>IW_{it} = -0,758774 + 0,080291DP_{it} - 0,040134GE_{it} + 0,000392GROWTH_{it}</math></b>			
(0,7191)	(0,5191)	(0,6557)	*** (0,0731)

$R^2 = 0.996416$ ;  $Adj R^2 = 0.995180$ ;  $F.Stat = 806.2664$ ;  $Prob F.Stat = 0.000000$

**Sumber:**Data diolah E-views, 2021. **Keterangan:** \*Signifikansi pada  $\alpha = 0,01$ ; \*\*Signifikansi pada  $\alpha = 0,05$ ; \*\*\*Signifikansi pada  $\alpha = 0,1$

Tabel 5. Effect Dan Konstanta Cross Section

SWP	Effect	Konstanta
Bergasmalang	-0,051466	-0,81024
Petanglong	-0,267811	-1,026585
Kedungsepur	0,262944	-0,49583
Wanarakuti	0,294874	-0,4639
Banglor	-0,361395	-1,120169
Subsukowonosraten	-0,055491	-0,814265
Purwomanggung	-0,070781	-0,829555
Barlingmascakep	0,249126	-0,509648

Pada tabel 5 diketahui nilai *effect* dan konstanta pada masing-masing wilayah di SWP Jawa Tengah. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana *effect* yang dimiliki oleh masing-masing cross section dalam mempengaruhi variabel independen untuk mengurangi angka ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

Diketahui bahwa nilai konstanta pada setiap wilayah pengembangan di Provinsi Jawa tengah bernilai negatif, yang berarti ketimpangan pembangunan di wilayah tersebut tergolong rendah. Nilai konstanta terendah berada di wilayah pengembangan Banglor dan Petanglong dengan nilai konstanta masing-masing sebesar -1,120169 dan -1,026585

### 3.2 Uji Keباikan Model Terpilih

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa nilai p (p-value) probabilitas F-Statistik adalah  $0,00 < \alpha$  (0,05). Artinya, model yang dipakai eksis. Kesimpulannya yaitu dana perimbangan, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Jawa Tengah.

Hasil perhitungan model *Fixed Effect* (FEM) menunjukkan bahwa nilai  $R^2$  yaitu 0,99 (99%) yang artinya, variabel dana perimbangan, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi mampu menjelaskan sebesar 99% ketimpangan pembangunan yang terjadi di Jawa Tengah. Sedangkan, 1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen

Variabel	t.statistik	prob	kriteria
LOG DP	0,652757	0,5191	tidak signifikan
LOG GE	-0,450473	0,6557	tidak signifikan
GROWTH	1,860017	0,0731	< 0,1 signifikan ( $\alpha = 10\%$ )

### 3.3 Interpretasi Ekonomi

#### 3.3.1 Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Pembangunan

Variabel dana perimbangan bernilai positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Jawa Tengah. Sehingga dapat diartikan bahwa dana perimbangan tidak selalu berpengaruh terhadap naik turunnya angka ketimpangan pembangunan. Dengan menggunakan formulasi penjumlahan antara Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil, penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dari (Oktaviani, Zulgani and Rosmeli, 2017) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus bernilai positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi. Penelitian lain juga sebutkan oleh (Azizi, 2018) yang menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi regional. Berdasarkan RPJMD Jawa Tengah 2018-2023 Formulai dana perimbangan di Jawa Tengah tertinggi adalah DAU sebesar 50,8% kemudian DAK sebesar 32,26% dan DBH sebesar 7,04%. formulasi DAU berdasarkan portal berita resmi [Jatengprov.go.id](http://Jatengprov.go.id) banyak digunakan untuk gaji pegawai sedangkan untuk

pembangunan infrastruktur sebesar 25% dari total DAU. Selain itu, formulasi DAK dan DBH belum mampu memperbaiki ketimpangan regional.

### 3.3.2 Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan

Berdasarkan uji validitas pengaruh menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bernilai negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Jawa Tengah. Artinya apabila terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah maka tidak berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan ketimpangan pembangunan di Jawa Tengah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya (Barika, 2013) dimana pengeluaran pemerintah bernilai negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di kabupaten/kota Provinsi Bengkulu. Pengeluaran pemerintah memang berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penerimaan dan pembiayaan daerah. Namun, pengeluaran pemerintah tidak secara langsung berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah (Gulo, Zamzami and Bhakti, 2017). Hal ini disebabkan oleh perbedaan tiap-tiap daerah dalam pengambilan keputusan untuk alokasi anggaran belanja. Apabila setiap daerah mampu mengalokasikan belanja daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan apabila hanya sebagian daerah yang mampu mengalokasikan belanja daerah dengan tepat maka pertumbuhan ekonominya tidak akan merata dan dapat memperburuk angka ketimpangan pembangunan.

### 3.3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan

Berdasarkan uji validitas pengaruh menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi bernilai positif dan signifikan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat memperburuk angka ketimpangan pembangunan di Jawa Tengah. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian dari (Harun and Maski, 2012) bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di wilayah Jawa Timur.

Meningkatkannya angka ketimpangan pembangunan antarwilayah di Jawa tengah akibat naiknya pertumbuhan ekonomi sesuai dengan teori kausasi kumulatif yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Menurut teori kausasi kumulatif hubungan antara daerah maju dengan daerah berkembang akan menimbulkan

ketimpangan. Hal ini dikarenakan akan terjadi efek *backwash* apabila terjadi pembangunan yang maju di suatu daerah maka menimbulkan daerah yang tertinggal menjadi semakin tertinggal. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan dari segi modal, tenaga kerja, keterampilan, dan fasilitas publik (Harun and Maski, 2012)

Sesuai dengan teori ekonomi model neo-klasik, bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah tergantung pada kemampuan wilayah untuk meningkatkan kegiatan produksi. Sedangkan mobilitas faktor produksi pada negara berkembang kurang lancar yang berakibat pada ketimpangan pembangunan antarwilayah karena modal dan tenaga kerja yang lebih terkonsentrasi di daerah maju. Hal inilah yang mengindikasikan mengapa pada saat pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, bukan memberikan pemerataan ekonomi justru meningkatkan ketimpangan pembangunan antarwilayah.

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan dari penelitian Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Pengeluaran Pemerintah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016-2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pengujian pemilihan model terbaik dengan menggunakan uji chow dan uji hausman model terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM)
- b. Berdasarkan uji kebaikan model (Uji F) pada pendekatan model terpilih *Fixed Effect* terbukti bahwa model eksis yang artinya dana perimbangan, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Jawa Tengah.
- c. Nilai koefisiensi determinan ( $R^2$ ) sebesar 0,99 (99%) yang artinya, variabel dana perimbangan, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi mampu menjelaskan sebesar 99% ketimpangan pembangunan yang terjadi di Jawa Tengah.
- d. Berdasarkan uji validasi pengaruh (Uji t) dapat diketahui bahwa secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap

ketimpangan pembangunan wilayah di Jawa Tengah, sedangkan variabel dana perimbangan dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Jawa Tengah.

- e. Berdasarkan hasil regresi *Fixed Effect Model* ( FEM) mengenai pengaruh dana perimbangan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah di Jawa Tengah terlihat bahwa nilai konstanta di setiap wilayah pengembangan bernilai negaatif yang artinya ketimpangan pembangunan dikatakan rendah

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah di muat, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Karena pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Jawa Tengah, maka diharapkan agar pemerintah daerah setempat dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara merata khususnya daerah dengan PDRB yang masih tergolong rendah agar dapat mengurangi ketimpangan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pemerintah perlu memfokuskan anggaran yang proporsional untuk mendorong pembangunan ekonomi secara merata baik melalui pemanfaatan SDA maupun SDM agar daerah yang tertinggal dapat meningkatkan pembangunan ekonominya sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.
- c. Pemerintah dapat melakukan efisiensi belanja daerah dengan cara memfokuskan pada belanja modal untuk membangun fasilitas publik. Salah satu cara untuk efisiensi belanja daerah adalah dengan mengurangi pengeluaran yang tidak terlalu penting seperti mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi instansi maupun dengan cara penghematan belanja perjalanan dinas.
- d. Bagi akademisi yang melakukan penelitian terkait ketimpangan pembangunan, diharapkan dapat menambah variabel lain yang berkaitan maupun menambah jangka waktu penelitian agar lebih kompleks dan lebih akurat hasilnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Amalia, F. (2017) 'Flypaper Effect Of Regional Expenditures and It's Impact to

- Regional Inequality In Indonesia’, *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6, pp. 125–138.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arsyad, L. (2010) *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Azizi, M. (2018) ‘Dampak Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Ketimpangan Produk Dpmestik Bruto di Provinsi Sulawesi Selatan 2006-2014’, *Economic and Business Of Islam*.
- Barika (2013) ‘Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2009’, *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan (JEPP)*, 4, pp. 1–10.
- BPS (2017) *Ketimpangan Pembangunan di Jawa Tengah 2017*. Available at: <https://pekalongankab.bps.go.id/news/2018/04/05/17/ketimpangan-pembangunan-di-jawa-tengah-2017.html> (Accessed: 2 April 2021).
- BPS (2019) *Statistik Keuangan Daerah Kota Surakarta 2018*, Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. Available at: <https://surakartakota.bps.go.id/publication/2019/12/31/401b7b7212f01ce9ca0632b/statistik-keuangan-daerah-kota-surakarta-2018.html>.
- Gujarati, D. and Porter, D. C. (2010) *Dasar-Dasar Ekonometrika=Basic Econometrics Buku*. Jakarta: Salemba Empat McGraw Hill.
- Gulo, A. K., Zamzami and Bhakti, A. (2017) ‘Dampak Alokasi Belanja Langsung Terhadap Ketimpangan Ekonomi Wilayah (Studi Kasus Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bengkulu)’, *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 12, pp. 57–66.
- Harun, L. and Maski, G. (2012) ‘Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah (studi pada kabupaten dan kota di Jawa Timur)’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Hasan, M. and Aziz, M. (2018) *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. 2nd edn, CV. Nur Lina. 2nd edn.
- Ikhsan, M. (2014) *Administrasi Keuangan Publiki, Universitas Terbuka*. Available at: <http://repository.ut.ac.id/4629/1/MAPU5202-M1.pdf>.
- Indonesia, P. (no date a) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Available at: [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_1999\\_25.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_25.pdf)

(Accessed: 20 April 2021).

- Indonesia, P. (no date b) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Available at: <https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/uu-33-2004.pdf> (Accessed: 20 April 2021).
- Jateng, Y. P. (2017) *Lebih Target, Pendapatan Daerah Surakarta 2017 Capai 100,33%*. Available at: <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/lebih-target-pendapatan-daerah-surakarta-2017-capai-10033/>.
- Juanda, B. and Junaidi (2012) *Ekonometrika Deret Waktu dan Aplikasinya*. Bogor: UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, M. (2015) *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. 3rd edn. Jakarta: Erlangga.
- Kyricou, A. P., Gallo, L. M. and Sagales, O. R. (2017) 'Regional Inequality, Fiscal Desentralization and Government Quality', *Regional Studies Association*, 51, pp. 946–957.
- Mubazaroh, Roschida and Hasmarini, M. I. (2020) 'Analisis Pengaruh Penetapan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2015-2017', *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Mutia (2018) *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pembangunan Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara*, *Universitas Sumatera Utara*.
- Ningsih, E. K., Novianty, D. E. and Ermelia, S. (2019) 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Disparitas Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan', *JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 5, pp. 14–22.
- Oktaviani, W., Zulgani and Rosmeli (2017) 'Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Jambi', *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, pp. 105–112.
- Pangestuti, F. W. and Arif, M. (2021) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Pembangunan di Provinsi Jawa Timur', *Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Available at: <http://eprints.ums.ac.id/89999/>.
- Permanasari, W. A. (2013) *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011)*, *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Pertiwi, Ika, M. and Purnomo, D. (2019) *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pertanian, Infrastruktur, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*



di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Available at: <http://v2.eprints.ums.ac.id/archive/etd/70978>.

Prasetya, F. (2012) 'Modul Ekonomi Publik, Bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah', *Universitas Brawijaya*.

Samirin, W. (2014) *Bridging The Gap: Mengurangi Ketimpangan, Meluruskan Esensi Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Siyoto, S. and Sodik, M. A. (2015) *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sjafrizal (2012) *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sjafrizal (2014) *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali.

Sucihati, H. (2014) 'Pengaruh Kenaikan Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kalimantan Barat', *Universitas Tanjungpura*.

Sumiyarti (2018) 'Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Wilayah dan Kemiskinan di Provinsi Banten', *Media Ekonomi*, 26, pp. 77–88.

Utama, K. P. (2019) *RPJMD Pemprov Jateng Tahun 2018-2023*. Available at: <https://ppid.jatengprov.go.id/rpjmd-pemerintah-provinsi-jawa-tengah/>.

Wandira, A. G. (2013) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Modal', *Universitas Negeri Semarang*.

Widarjono, A. (2016) *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. 4th edn. Yogyakarta: LPP STIM YKPN.

Yaqin, S. M. Z., Yunani, A. and Nur, M. A. (2018) 'Pengaruh Anggaran Belanja, Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan', *At Tharadhi Jurnal Studi Ekonomi*, 9, pp. 63–75.